

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)**

SKRIPSI



**Nama : Fadhlan Husni
NIM : 222014445**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA
PEMERINTAH DAERAH
(Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Fadhlan Husni
NIM : 222014445**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2019**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhlán Husni

Nim : 222014445

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Palembang, 2019

Yang membuat pernyataan,



Fadhlán Husni

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja
Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pads Organisasi
Perangkat Daerah Kota Palembang)
Nama : Fadhlani Husni
NIM : 222014445
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada Tanggal, Februari 2019

Pembimbing I,



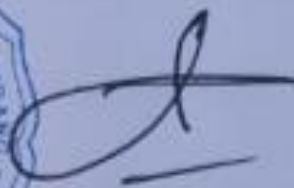
DR. Sa'adah Siddik, S.E, Ak, M.Si, CA
NIDN/NBM : 0002095507/972321

Pembimbing II,



Wellv, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0212128102/1085022

Mengetahui,
Dekan
U.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri, S.E., M.Si., Ak., CA
NIDN/NBM : 0216106902/944806

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- *Tidak ada seorangpun yang tidak pernah jatuh/gagal, namun mereka yang kembali bangkitlah yang akan berhasil*
- *Percaya lah dengan kebaikan yang ALLAH tetapkan dan tak akan tertukar dengan orang lain.*

(Fadhlan Husni)

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- *Bapak dan Ibuku tercinta*
- *Adik, Ayuk dan Kakakku Tersayang*
- *Dosen Pembimbing Skripsiku*
- *Dosen Pembimbing Akademikku*
- *Sahabat-Sahabat Terbaikku*
- *Almamater Kebanggaanku*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)”**. Skripsi tersebut untuk memperoleh gelar sarjana dari fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah palembang.

Sumber Daya Manusia yaitu Kualitas sumber daya manusia menyangkut mutu dari tenaga kerja yang menyangkut kemampuan, baik berupa kemampuan fisik, kemampuan intelektual (pengetahuan), maupun kemampuan psikologis (mental). Pengawasan fungsional pemerintah daerah adalah pengawasan terhadap pemerintahan daerah yang dilakukan secara fungsional baik dilakukan oleh departemen sektoral maupun departemen yang menyelenggarakan pemerintahan umum (departemen dalam negeri). Sistem pengendalian intern (SPI) adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. akuntabilitas publik yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan. Komitmen organisasi mencerminkan tingkat di mana seseorang mengenali sebuah organisasi dan terikat pada tujuan-tujuannya.

Sumber daya manusia, pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern, akuntabilitas publik, dan komitmen organisasi di perlukan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah kota Palembang.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orangtuaku dan saudara-saudaraku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu DR.Hj.Sa'adah Siddiik S,E, M.Si.,Ak,.CA dan ibu welly S.E.M.Si yang telah membimbing dan memberikan pengarahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf dan karyawan
3. Bapak Betri Sirajuddin S.E,. M.Si,. Ak,. CA dan Ibu Nina Sabrina S.E,. M.Si selaku ketua dan sekretaris program studi akuntansi fakutas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Betri Sirajuddin S.E,. M.Si,. Ak,. CA selaku pembimbing akademik saya yhang memotvasi dan memberikan dukungan kepada saya.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.

6. Pimpinan beserta Staf dan karyawan-karyawati Kantor Akuntan Publik di Kota Palembang dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan.
7. Pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis berupa materiil dan spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirul kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis

Fadhlan Husni

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
HALAMAN PRAKATA	vi
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	12

2. Kinerja Pemerintah Daerah	13
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah	17
a. Kualitas Sumber Daya Manusia.....	20
b. Pengawasan Fungsiona	22
c. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.....	23
d. Akuntabilitas Publik.....	26
B. Penelitian Sebelumnya	29
C. Kerangka Pemikiran.....	35
D. Hipotesis.....	35

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Tempat Penelitian	38
C. Operasionalisasi Variabel	39
D. Populasi.....	40
E. Data Yang Diperlukan	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	43
G. Analisis Data dan Teknik Analisis.....	44
1. Analisis Data	44
2. Teknik Analisis	47
a. Uji Validitas.....	47
b. Uji Reliabilitas.....	48
c. Uji Asumsi Klasik	49
d. Regresi Linear Berganda	52

e. Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>).....	53
f. Uji Hipotesis	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	56
1. Gambaran Singkat tentang Organisasi perangkat daerah kota Palembang	56
2. Jawaban Responden	58
3. Pengujian Hasil Penelitian	75
a. Pengujian Validitas dan Reliabilitas Data	75
b. Uji Asumsi Klasik	79
c. Analisis Regresi Linear Berganda.....	85
d. Koefisien Determinasi (<i>Adjusted R Square</i>)	86
e. Pengujian Hipotesis.....	87
B. Hasil Pembahasan Penelitian	92
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	100
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRA

ABSTRAK

Fadhlan Husni/ 2220114445/ 2019/ Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada yaitu apakah kualitas sumber daya manusia, pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kota Palembang. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia, pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kota Palembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang bekerja pada OPD kota Palembang sebanyak 102 responden. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan kuesioner dan wawancara. Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja pemerintah daerah kota Palembang dipengaruhi oleh variable kualitas sumber daya manusia, variable pengawasan fungsional, variable sistem pengendalian intern pemerintah, variable dan akuntabilitas public secara bersama sama.

Katakunci: Kinerja Pemerintah Daerah

Abstract

Fadhlan Husni / 222014445/2019 / Influential Factors against Local Government Performance (Case Study of the Regional Organizations Palembang)

This study was conducted to answer the existing problems, namely whether the human resources quality, functional supervision, government internal control system and public accountability had a positive influence on regional government performance of Palembang. The objective of this study was to find out the human resources quality, functional supervision, government's internal control systems and public accountability have a positive influence on regional government performance of Palembang. The study was an associative study. The data used were primary and secondary data. The population in this study was 102 employees who worked in OPD of Palembang city. Data collection techniques were using questionnaires and interviews. The data analysis method used in this study was quantitative analysis. The results showed that local government performance of Palembang was influenced by variable of human resources quality, functional supervision variables, government internal control system, and public accountability simultaneously.


Keywords: Local Government Performance

PENGESAHAN

NO. 314 /Abstract/LB/UMP/ III / 2019

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang 

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ataupun kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh peran pemerintah daerah dalam mengendalikan semua sektor kehidupan masyarakat dan pihak swasta turut membantu pemerintah dalam mewujudkannya. Kinerja pemerintah daerah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat meliputi sarana transportasi, komunikasi, pendidikan, dan kesehatan dengan cara mengelola APBD secara efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adalah suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, dan kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakan dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD dalam peraturan perundangan yang disebut Peraturan Daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menggali potensi pendapatan daerah serta harus mengalokasikan secara tepat pendapatan yang diperoleh kedalam pengeluaran sehingga terjadinya efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dana yang dialokasikan untuk belanja dalam rangka menyelenggarakan program pemerintah maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pendapatan pemerintah daerah yaitu berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sumber utamanya pendapatan pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD) khususnya dari sector pajak. Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam pendapatan pemerintah, karena semua kehidupan tidak terlepas dari pajak. Semakin tinggi pendapatan pemerintah dapat dicapai akan menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik.

Mahsun (2016: 25) kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu.

Mardiasmo (2011:181) mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor internal terdiri dari tujuan organisasi, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan budaya organisasi, dan faktor eksternal terdiri dari faktor politik, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Mertyani (2015: 4-5) Untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menerapkan anggaran berbasis kinerja, maka sangat diperlukan peningkatan partisipasi penyusunan anggaran, kualitas sumber daya manusia, sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan fungsional, penerapan sistem informasi akuntansi. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kualitas sumber

daya manusia, pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern pemerintah, akuntabilitas publik, dan komitmen organisasi.

Berdasarkan data yang didapat, untuk mendorong percepatan pembangunan, sehingga terwujud kesejahteraan bagi masyarakat Walikota dan Wakil Walikota Palembang mulai fokus kepada pembenahan, melalui penambahan anggaran di beberapa sektor. Seperti yang disampaikan Walikota Palembang Harnojoyo, dimana pihaknya mulai fokus kepada pembenahan di bidang pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran sebesar 38,95% dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2017, melebihi yang ditetapkan Undang-undang sebesar 20%. "Kita akan terus tingkatkan pelayanan pendidikan, dengan terus memperbaiki kualitas pendidikan melalui peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas pendidikan di Kota Palembang," jelasnya. Baginya, pendidikan menjadi modal dasar pihaknya dalam memajukan Kota Palembang. Karena, melalui peningkatan mutu SDM, Palembang akan menjadi kota terdepan. Untuk mewujudkan semua itu, perlu sarana dan prasarana serta mutu pendidikan yang berkualitas. Hal itulah yang membuat pihaknya merasa perlu menambah alokasi dana pendidikan, sehingga masyarakat serta anak-anak di Palembang dapat menempuh pendidikan dengan fasilitas yang memadai. Sejak itu, minat melaksanakan pendidikan di Kota Palembang pun terus meningkat. Sebagai gambaran Angka Partisipasi Kasar (APK) SD 112.05, SMP 97.08 dan SMA 84.32. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SD 92.7, SMP 76,18 dan SMA 58.27 dengan rata-rata lama sekolah di Kota Palembang 12 Tahun.

<http://www.palembang.go.id/berita/297/pendidikan-jadi-prioritas-harnojoyo-fitri>

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BK-PSDM) Kota Palembang, bakal menurunkan tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan [Pemkot Palembang](#). Hal ini dilakukan guna memastikan pelayanan yang diberikan oleh ASN dan non ASN berjalan baik. Kepala BK-PSDM Kota Palembang Ratu Dewa menyampaikan, bakal menurunkan tim khusus untuk memantau kinerja para [pegawai](#). Karena, masyarakat terus membutuhkan pelayanan prima dari seluruh [pegawai Pemkot Palembang](#). Selain itu peningkatan kinerja juga landasan penilaian untuk seluruh PNS terkait tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Tim khusus yang terdiri dari [pegawai](#) BK-PSDM dan PolPP Palembang ini akan mulai melakukan pengawasan.

Artikel ini telah tayang di [sripoku.com](#) dengan judul Pantau Kinerja Pegawai Pemkot Palembang Turunkan Tim Khusus, <http://palembang.tribunnews.com/2018/05/17/pantau-kinerja-pegawai-pemkot-palembang-turunkan-tim-khusus>.

Brian Sagay (2013) meneliti tentang Kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten minahasa selatan. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah kabupaten Minahasa Selatan belum mampu mengola dan mengoptimalkan PADnya. Ini dilihat dari rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian keuangan yang masih sangat rendah. Kinerja pendapatan pemerintah kabupaten Minahasa Selatan dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan tahun 2008-2011 belum baik, ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan yang negatif pada tahun 2008 dan 2010.

Mertyani Sari Dewi, dkk (2015) Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah, (2) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah daerah, (3) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah, (4) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pengawasan fungsional terhadap kinerja pemerintah daerah, (5) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Melvi (2015) dengan judul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). Hasil pengujian hipotesis pertama membuktikan bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil Pengujian hipotesis yang ke dua membuktikan bahwa variabel pengendalian interen berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil pengujian hipotesis yang ke tiga membuktikan bahwa variabel budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil pengujian hipotesis yang ke empat membuktikan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu. Hasil pengujian hipotesis yang ke lima membuktikan bahwa variabel komitmen

organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah pada Kabupaten Indragiri Hulu.

Kota Palembang adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Palembang adalah kota terbesar kedua di Sumatera setelah Kota Medan. Kota Palembang memiliki luas wilayah 358,55 km² yang dihuni 1,7 juta orang dengan kepadatan penduduk 4.800 per km². Diprediksikan pada tahun 2030 mendatang Kota ini akan dihuni 2,5 Juta orang. Berikut daftar Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang:

Tabel I.1
Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang

No	Nama Dinas OPD	Alamat
1	Badan Pengelolaan Pajak Daerah	Jl. Merdeka No.21, 19 Ilir, Bukit Kecil, Palembang
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Jl. Merdeka No.22, 19 Ilir, Bukit Kecil, Palembang
3	Dinas Pendidikan	Jl. Pramuka, Srijaya, Alang-Alang Lebar, Palembang
4	Dinas Kesehatan	Jl. Merdeka No.72, 22 Ilir, Bukit Kecil, Palembang
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Jl. Nyoman Ratu No.1271 Palembang
6	Dinas Kebudayaan	Jl. Sultan Mahmud Badarudin II No.2 Palembang
7	Dinas Pariwisata	Jl. Dr. Wahidin, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang
8	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Jl. Demang Lebar Daun No.4255 Palembang
9	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jl. Dr. Wahidin, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang
10	Dinas Ketenagakerjaan	Jl. Kapten Anwar Sastro, Palembang
11	Dinas Koperasi dan UKM	Jl. Merdeka No.06, 22 Ilir, Bukit Kecil, Palembang
12	Dinas Perdagangan	Jl. Demang Lebar Daun No.2610 Palembang
13	Dinas Perindustrian	Jl. Lunjuk Jaya No.02 Ilir Barat I, Palembang
14	Dinas Perhubungan	Jl. Pangeran Sio Ing Lautan, 35 Ilir.

		Palembang
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	Jl. Merdeka No.08, 19 Ilir, Bukit Kecil, Palembang
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota	Jl. Sukarela No.129A, Sukarami, Palembang
17	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota	Jl. Slamet Riyadi, Lawang Kidul, Ilir Timur II, Palembang

Sumber: KESBANGPOL Kota Palembang, 2018

Berikut data pencapaian kinerja pemerintah kota Palembang dalam memaksimalan pendapatan asli daerah kota Palembang:

Tabel I.2
Rasio Kinerja Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014-2017

No	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017
1	Rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap potensi Pendapatan Asli Daerah	96,59%	99,46%	92,48%	99,31%
2	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan	26,32%	25,69%	25,14%	32,10%

Sumber: LAKIP Pemerintah Kota Palembang, 2018

Berdasarkan Tabel I.1 menunjukkan bahwa dari tahun 2014 sampai tahun 2017 realisasi pendapatan asli daerah kota Palembang tidak tercapai secara maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh tidak tercapainya anggaran pendapatan asli daerah secara maksimal dikarenakan berkurangnya pendapatan dari Retribusi Daerah. Fenomena ini menunjukkan belum optimalnya kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak daerah dalam capaian target kinerja yang ditetapkan. Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah kota Palembang dilihat dari wacana yang disampaikan Walikota bahwa perlu ditingkatkannya mutu sumber daya manusia meliputi peningkatan sarana dan prasarana serta

pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan kinerja pemerintah Kota Palembang.

Berdasarkan survei pendahuluan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang kinerja organisasi mengalami penurunan pada ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan dan penetapan APBD. BPKAD Kota Palembang sudah menggunakan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) namun pegawai belum dapat menggunakan sistem tersebut dengan maksimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat pegawai BPKAD berjumlah 18 orang dengan latar belakang pendidikan SMA sederajat dimana 10 orang PNS dan 8 orang P3K (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, serta belum mendapatkan pelatihan secara rutin penggunaan SIMDA. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia pada BPKAD masih perlu ditingkatkan, SDM yang baik harus memenuhi aspek non fisik dimana upaya yang dilakukan untuk mengembangkan manusia didalam aspek non fisik dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan.

Kemudian kurang optimalnya kinerja pemerintah kota Palembang dipengaruhi juga kurangnya pengawasan fungsional terhadap kinerja setiap pegawai Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palembang. Pada tahun 2018 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang membentuk tim khusus untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah Palembang guna memastikan pelayanan dan kinerja berjalan dengan baik.

Nordiawan dalam Wirmie (2018: 182) pelaporan kinerja sangat penting karena kinerja pemerintah daerah diukur dan dinilai melalui laporan kinerja,

untuk itu dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlukan adanya akuntabilitas manajerial dan akuntabilitas publik. Melvi (2015: 11) komitmen organisasi (*leadership style*) berpengaruh penting dalam meningkatkan kinerja. Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Komitmen tersebut dapat terwujud apabila individu dalam organisasi menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut maka penulis tertarik meneliti dengan judul *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah kualitas sumber daya manusia, pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka bahwa tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia,

pengawasan fungsional, sistem pengendalian intern pemerintah dan akuntabilitas publik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka penulis dapat menambah ilmu pengetahuan secara empiris mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (studi kasus pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang).

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian yang relevan dan lebih luas dalam faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Abdul Halim. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan.
- Bambang Suharjo. 2013. *Statistika Terapan*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik. Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Iqbal Hasan. 2013. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Kaswan. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Keunggulan Bersaing Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lidia Hasnani. 2016. Pengaruh Komitmen Organisasi, Pengawasan Fungsional Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi). *JOM Fekon Vol. 3 No. 1 (Februari) 2016 hlm 16-30*.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. 2016. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Melvi Olinda. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah (Study Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM. FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*
- Mertyani Sari Dewi, dkk. 2015. Faktor – faktor yang mempengaruhi Kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangli). *e-journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi SI (Volume 3 No. 1 Tahun 2015)*.
- Moehariono. 2012. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mohamad Mahsun. 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. Mardiasmo. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Nur Jannah, dkk. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Manajerial Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA) Volume 20 Nomor 04 Tahun 2018*.
- Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber daya manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Singgih Santoso. 2012. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumanto. 2014. *Statistika Terapan*. Cetakan Pertama. Jakarta : Center of Academic Publishing Service.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Wirmie Eka Putra. 2017. Analisis Pengaruh Pengawasan Fungsional, Akuntabilitas Publik Dan Peningkatan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD di Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 18(02), 2018, 181-187, ISSN 1412-629X | E-ISSN 2579-3055*